

# EVALUASI KEBIJAKAN SWAKELOLA PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA DENPASAR PROVINSI BALI

Putu Eka Widiantara

NPP. 30.1069

Asdaf Kota Denpasar, Provinsi Bali

Program Studi Kebijakan Publik

Email: [ekawidiantara16@gmail.com](mailto:ekawidiantara16@gmail.com)

Pembimbing Skripsi: Nur Saribulan, S.IP, MPA

---

## ABSTRACT

**Problem Statement/Background (GAP):** Self-management of waste management is one of the policies issued by the Mayor of Denpasar in an effort to reduce and sort waste starting from the household level to increase public awareness and participation in environmental protection and management. **Purpose:** This study aims to find out and describe how the evaluation of waste management self-management policies in Denpasar City and how the efforts made by the Denpasar City Environment and Hygiene Office in overcoming waste problems in Denpasar City and obstacles experienced when implementing waste self-management policies. **Method:** This research was analyzed based on policy evaluation theory according to William N. Dunn on the basis of 6 (six) aspects, namely effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness and permanence. The method, the research used is a descriptive qualitative method. The research conducted by the authors used data collection techniques through observation, interviews, and documentation. Then, data analysis techniques are carried out in analytical techniques according to Nurdin and Hartati which have 3 stages, namely data collection, data reduction, and data presentation and then in determining the author's informant using purposive sampling techniques. **Result:** The results showed that the evaluation of waste management self-management policies in Denpasar City is still running ineffectively because it still experiences several obstacles. From the aspect of effectiveness, efficiency, adequacy, equity, and responsiveness, it shows that the implementation of waste management self-management has not run well but from the aspect of accuracy of waste management self-management has run well. **Conclusion:** To maximize the waste management self-management policy, researchers suggest that the Environment and Hygiene Office should re-conduct more intensive and routine socialization with the aim of increasing public awareness in Denpasar City of the importance of maintaining cleanliness and environmental conduciveness, one of which is by managing waste independently or self-managed and maximizing the use of available infrastructure.

**Keywords:** evaluation, policy, self-management, waste

---

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Swakelola pengelolaan sampah merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar dalam upaya untuk melakukan pengurangan dan pemilahan sampah mulai dari tingkat rumah tangga hingga meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana evaluasi kebijakan swakelola pengelolaan sampah di Kota Denpasar serta bagaimana upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar dalam mengatasi permasalahan persampahan yang ada di Kota Denpasar dan kendala yang dialami saat penerapan kebijakan swakelola sampah. **Metode:** Penelitian ini dianalisis berdasarkan teori evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn dengan dasar 6 (enam) aspek yaitu efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsifitas dan ketetapan. Metode, penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian, teknik analisis data dilaksanakan dalam teknik analisis menurut Nurdin dan Hartati yang terdapat 3 tahapan yaitu pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data dan kemudian dalam menentukan informan penulis menggunakan teknik purposive sampling. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan swakelola pengelolaan sampah di Kota Denpasar masih berjalan dengan kurang efektif karena masih mengalami beberapa hambatan. Dari aspek efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, dan responsifitas menunjukkan bahwa pelaksanaan swakelola pengelolaan sampah belum berjalan dengan baik tetapi dari aspek ketepatan swakelola pengelolaan sampah sudah berjalan dengan baik. **Kesimpulan:** Untuk memaksimalkan kebijakan swakelola pengelolaan sampah peneliti menyarankan agar Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan harus melakukan kembali sosialisasi yang lebih intensif dan rutin dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat di Kota Denpasar akan pentingnya menjaga kebersihan dan kondusifitas lingkungan salah satunya yaitu dengan cara mengelola sampah secara mandiri atau secara swakelola dan memaksimalkan penggunaan infrastruktur yang tersedia.

**Kata kunci:** evaluasi, kebijakan, swakelola, sampah

---

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Perkembangan suatu zaman yang semakin cepat memiliki suatu dampak yang mengakibatkan beberapa orang harus bisa cepat menyesuaikan diri berbaur dengan perkembangan modernisasi, industrialisasi, kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Perkembangan ini dapat menimbulkan ketegangan atau stress pada diri manusia itu sendiri karena perbedaan kemampuan menyesuaikan diri dan berbaur setiap orang yang berbeda-beda (Matondang, 2019).

Jika dilihat dari nilai konseptual maka terdapat adanya faktor sosial ekonomi yang merubah masyarakat akan lebih ada di situasi sesudah industry, sehingga penghasilan yang mereka miliki dinilai sangat rendah. Maka dari itu tidak hanya perubahan ekonomi yang harus direalisasikan namun perubahan sosial juga harus dilaksanakan (Susila, 2019). Manusia dengan alam merupakan konsep yang saling berhubungan. Pada masa kini banyak sekali permasalahan yang berkaitan dengan kedua hal tersebut sehingga berbagai permasalahan yang dijumpai dikategorikan sebagai masalah yang bersifat global.



Sampah dikenal sebagai limbah yang umumnya mempunyai sifat padat dan juga sebagian padat yang sudah tidak dapat digunakan lagi yang kemudian harus dikelola agar tidak merusak lingkungan. Selain itu bentuk fisik dari sampah tersebut dapat berubah tergantung dari bagaimana cara diangkut atau diolahnya sampah tersebut (Kusnayadi et al., 2021).

Adapun data sampah pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di negara Indonesia tahun 2020 disebut menyentuh angka 67,8 juta ton dan 15% di antaranya adalah sampah yang terbuat dari bahan plastik. Untuk sementara, 88,17% dari sampah tersebut diangkut ke TPA sampai berhamburan di sekitar jalan akibat overload dari TPA tersebut. Berdasarkan data Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) pada 2020 tingkat pengumpulan sampah hanya 36,4 persen, jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara lainnya negara Indonesia termasuk yang terkecil karena rata-rata negara di Asia Tenggara lainnya berada di atas 70 persen.

Pelaksanaan upaya mengelola sampah yang ada menggunakan dua pendekatan diantaranya dengan mengurangi sampah yang digunakan serta menanggulangi sampah yang ada. Upaya mengurangi sampah dengan menerapkan aktifitas seperti membatasi sampah yang tertimbun dikenal dengan istilah reduce, melakukan daur ulang sampah yang ada seperti recycle serta menggunakan sampah kembali atau yang dikenal dengan istilah reuse serta menangani sampah dengan upaya memilah, mengumpulkan, mengangkut, mengolah, serta diperoleh hasil akhir dalam bentuk tindak lanjut penanggulangan sampah (Kusminah, 2018).

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, permasalahan pokok yang dapat diidentifikasi untuk dihadapi dalam Evaluasi Kebijakan Swakelola Pengelolaan Sampah di Kota Denpasar Provinsi Bali antara lain:

1. Evaluasi Kebijakan Swakelola Pengelolaan Sampah di Kota Denpasar Provinsi Bali.
2. Faktor penghambat berjalannya Kebijakan Swakelola Pengelolaan Sampah di Kota Denpasar Provinsi Bali Rendahnya pengetahuan petani salak terhadap teknologi pemanfaatan produksi buah salak untuk dijadikan produk olahan.
3. Upaya dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kesehatan Kota Denpasar dalam mengatasi faktor penghambat berjalannya Kebijakan Swakelola Pengelolaan Sampah di Kota Denpasar Provinsi Bali.

## **1.3. Penelitian Terdahulu**

Dalam melakukan Penelitian ini, penulis mengacu dan membandingkan temuan dari Penelitian sebelumnya. Muhammad Rapii, Muhammad Zainul Majdi, Rohaeniah Zain, dan Qurratul Aini, 2021, Pengelolaan Sampah Secara Terpadu Berbasis Lingkungan Masyarakat Di Desa Rumbuk dengan hasil Masyarakat mendapatkan pengetahuan tentang pentingnya mengetahui cara menjaga kebersihan dan Kesehatan lingkungan salah satunya adalah dengan cara mengubah sampah rumah tangga menjadi kompos. Penelitian I Made Dicky Taruna Wijaya, Ida Ayu Putu Widiati, Dan I Wayan Arthanaya, 2022, Efektivitas Pelaksanaan Program Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber dengan hasil Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa sampah merupakan masalah yang tergolong untuk sulit dipecahkan. Pada pengelolaan sampah perlu dilakukannya pemilahan antara sampah organik dan anorganik dan adanya peran BUPDA untuk membantu masyarakat beranjak dari tata tradisional ke tata modern dan membantu memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pemilahan sampah dari sumbernya agar sampah yang disetorkan lebih mudah diolah di TPS3R. Penelitian I Gde Made Metera dan Ni Made Sumbertiasih, 2022, Sistem Pengelolaan Sampah Berbasis Kawasan/Masyarakat Di Kabupaten Buleleng dengan hasil menunjukkan bahwa terdapat inovasi yang dilakukan oleh



masyarakat terkait permasalahan pengolahan sampah yaitu memilah sampah berdasarkan jenisnya dari sumbernya. Kedua perlunya Kerjasama antara Dinas Lingkungan Hidup dengan dinas terkait permasalahan pengelolaan sampah dan kebersihan dengan meningkatkan tarif retribusi kepada pelayanan kebersihan dan persampahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Penelitian Intan Muning Harjanti dan Pratamaningtyas Anggraini, 2020, Pengelolaan Sampah Di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatibarang, Kota Semarang dengan hasil analisis pengelolaan sampah di TPA Jatibarang sudah cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya fasilitas persampahan dan fasilitas pengolahan sampah yang dapat digunakan oleh masyarakat. Penelitian Jailan Sahil, Mimien Henie Irawati Al Muhdar, Fachrur Rohman, dan Istamar Syamsuri, 2016, Sistem Pengelolaan dan Upaya Penanggulangan Sampah Di Kelurahan Dufa- Dufa Kota Ternate dengan hasil cara pengumpulan sampah secara perorangan langsung, tidak langsung, dan komunal langsung masih dimanfaatkan oleh Kota Ternate. Kedua, kepadatan dan persebaran penduduk Desa Dufa-Dufa, serta karakteristik lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat dan sikap, merupakan faktor penghambat yang mempengaruhi sistem pengelolaan sampah. Ketiga model pengelolaan sampah di Kota Ternate memiliki sejumlah komponen yang tetap memperhatikan dan memperhatikan karakteristik sampah serta kondisi sosial budaya masyarakat. Penelitian Ni Luh Putu Juniartini, 2020, Pengelolaan Sampah Dari Lingkup Terkecil dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai Bentuk Tindakan Peduli Lingkungan dengan hasil analisis bahwa masyarakat belajar pentingnya pengelolaan sampah, 5R (reuse, reduce, recycle, replace, repair), dan peran bank sampah dalam menumbuhkan tanggung jawab lingkungan. Dengan memberikan kekuatan lebih kepada masyarakat sekitar dan organisasi terkait, keduanya masyarakat membentuk kelompok kerja, sampah yang dihasilkan kini telah dikategorikan dan diatur berdasarkan jenisnya. Penelitian Michelle Yoselin Herdion Wong, 2019, Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (Tpas) Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Air Di Kota Balikpapan dengan hasil sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, pengelolaan sampah TPAS Manggar sudah berjalan dengan baik; namun pengelolannya masih belum optimal. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM), keterbatasan anggaran, dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga sarana dan prasarana persampahan menjadi akar penyebab belum sempurnanya pengelolaan sampah. Penelitian Hanum Puspa Dhiani, H. Arsid, Taufik Awaludin, Ma'fiah, Dan Surti Wardani, 2021, Manajemen Sistem Pengelolaan Sampah Yang Mampu Memanfaatkan Potensi Sampah Secara Optimal dengan hasil meningkatnya wawasan dan pengetahuan peserta Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) tentang pengelolaan sampah rumah tangga, khususnya dengan metode composting. Kedua, Peserta mampu menerapkan bagaimana mengelola sampah dengan metode composting. Kristian Agung, Erna Juita, dan Elvi Zuriyani, 2021, Analisis Pengelolaan Sampah Di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Desa Sido Makmur Kecamatan Sipora Utara dengan hasil berupa penyimpanan/ wadah, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, dan pembuangan/ pengolahan merupakan aspek teknis pengelolaan sampah di Desa Sido Makmur yang hampir sama dengan daerah lain di Indonesia. Kemudian, menyadari biaya sebagai sumber pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas dan peralatan persampahan untuk TPA sendiri menjadi kendala utama dalam pengelolaan sampah. Penelitian Sri Sulasmaningsih, Noegrahini L, dan Marlina, 2020, Pengelolaan Sampah Mandiri Berbasis Masyarakat Di Kelurahan Rangkapan Jaya Baru Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok Sebagai Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat dengan hasil berupa membiasakan masyarakat memilah-milah sampah dari sumber rumah tangga kemudian mendaur ulang sampah yang di produksi. Kedua, meningkatnya pendapatan masyarakat akibat dari pengelolaan sampah plastik atau non organik menjadi produk yang memiliki nilai. Terakhir, terciptanya lingkungan yang kondusif akibat dari timbulan sampah yang berkurang timbulannya terutama yang berasal dari sampah rumah tangga.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni Evaluasi Kebijakan Swakelola Pengelolaan Sampah di Kota Denpasar Provinsi Bali dimana semua program secara murni difasilitasi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kesehatan Kota Denpasar.

#### **1.5. Tujuan.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Evaluasi Kebijakan Swakelola Pengelolaan Sampah di Kota Denpasar Provinsi Bali mendeskripsikan faktor penghambat berjalannya Kebijakan Swakelola Pengelolaan Sampah di Kota Denpasar Provinsi Bali, serta mengetahui Upaya dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kesehatan Kota Denpasar dalam mengatasi faktor penghambat berjalannya Kebijakan Swakelola Pengelolaan Sampah di Kota Denpasar Provinsi Bali.

## **II. METODE**

Penelitian yang dilakukan saat ini penulis mengimplementasikan desain yang disebut dengan desain Penelitian kualitatif. Hal tersebut disebabkan penulis ingin memaparkan situasi yang terjadi sesuai dengan keadaan yang nyata ketika Penelitian dilaksanakan. Penelitian kualitatif yang dilaksanakan juga mendorong penulis untuk mengumpulkan berbagai data di lapangan kemudian penulis harus memaparkan data-data tersebut hingga dapat dianalisis serta penulis dapat merumuskan berbagai data dan fakta yang ada di kehidupan nyata. Pengamatan yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode deskriptif. Penelitian deskriptif berusaha menggambarkan suatu gejala atau peristiwa yang sedang terjadi.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1. Evaluasi Kebijakan Swakelola Pengelolaan Sampah Di Kota Denpasar Provinsi Bali**

Penelitian ini dianalisis dari berbagai aspek menurut William N. Dunn (2003), di antaranya efektivitas (effectiveness), efisiensi (efficiency), ketepatan (adequacy), perataan (equity), responsivitas (responsiveness), dan ketepatan (appropriateness). Dari enam kriteria di atas, penulis akan mendeskripsikan hasil Penelitian evaluasi kebijakan swakelola sampah di Kota Denpasar.

#### **1. Efektivitas (Effectiveness)**

Berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 76 Tahun 2019 pada paragraf 2 dijelaskan tentang pembatasan timbunan sampah dihimbau agar masyarakat menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbunan sampah sebagai bagian dari usaha atau kegiatannya, menggunakan bahan-bahan yang yang dapat didaur ulang, menghasilkan bahan baku yang dapat diguna ulang atau mudah terurai oleh alam. Dari data yang diperoleh penulis dari SIPSN terjadinya peningkatan timbunan sampah di Kota Denpasar tiap tahunnya dari tahun 2019 hingga tahun 2021. Hal ini juga didukung dengan tingkat pengolahan sampah pada TPS3R masih belum mampu menangani sepenuhnya sampah yang masuk tiap harinya sehingga menyisakan sampah pada TPS3R di esok harinya seperti yang terlampir pada tabel 4.3. Pada tahun 2019 kebijakan swakelola pengelolaan sampah tersebut dibentuk dengan tujuan untuk mengurangi timbunan sampah yang ada di Kota Denpasar namun berdasarkan data tersebut



dapat dikatakan bahwa kebijakan tersebut berjalan kurang efektif dikarenakan masih terjadi peningkatan timbulan sampah hingga tahun 2021.

## 2. Efisiensi (Efficiency)

Efisiensi dalam kebijakan publik merujuk pada kemampuan suatu program atau kebijakan publik untuk mencapai tujuannya dengan menggunakan sumber daya publik yang tersedia secara optimal. Dalam konteks kebijakan publik, efisiensi dapat diukur dengan menghitung biaya dan manfaat program atau kebijakan tersebut, dan mencari cara untuk meningkatkan efisiensi dengan mengurangi biaya dan meningkatkan manfaat. Hal ini sering melibatkan penilaian atas alternatif-alternatif kebijakan yang tersedia dan pemilihan kebijakan yang memberikan manfaat terbesar dengan biaya terendah. Berdasarkan data yang telah dilampirkan dapat disimpulkan bahwa Kebijakan swakelola pengelolaan sampah belum terlaksana secara efisien dalam penggunaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang ada. Hal ini didukung dengan menurunnya tingkat pencapaian kinerja pelayanan DLHK Kota Denpasar tiap tahunnya yang disebabkan karena kurangnya sumber daya manusia yang menangani permasalahan lingkungan, SDM yang dimiliki masih belum mampu mengatasi permasalahan lingkungan dan sarana dan prasarana yang masih belum memadai.

## 3. Kecukupan (Adequacy)

Kecukupan kebijakan publik penting karena sumber daya yang memadai dapat memastikan kelancaran pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks yang lebih luas, kecukupan juga dapat memastikan bahwa kebijakan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat secara keseluruhan. Berdasarkan data-data yang tersebut dapat disimpulkan, kebijakan swakelola sampah belum memenuhi aspek kecukupan dilihat dari dana yang dianggarkan masih belum dimanfaatkan dengan baik hingga realisasi anggaran belum terpenuhi. Selain itu, TPS3R yang berada di Kota Denpasar belum mampu bekerja secara efektif karena belum mampu mengelola keseluruhan sampah yang masuk ke TPS tiap harinya ditandai dengan penumpukan sampah berlebih hingga menutup sebagian jalan di Kota Denpasar yang disebabkan karena adanya faktor penghambat seperti kurangnya sarana dan prasarana yang dan kurangnya kesadaran masyarakat.

## 4. Perataan (Equity)

Perataan atau pemerataan dalam kebijakan publik adalah suatu usaha untuk mengurangi kesenjangan atau ketidaksetaraan antara kelompok masyarakat dalam hal akses terhadap sumber daya dan kesempatan. Dalam konteks ini, kesenjangan atau ketidaksetaraan dapat terjadi dalam berbagai aspek, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan hidup, dan sebagainya. Dalam aspek perataan atau equity belum terpenuhi seluruhnya. Contohnya pada pembangunan fasilitas TPS3R yang kurang mampu berjalan dengan efektif karena sosialisasi yang seharusnya diberikan Dinas Lingkungan di Kota Denpasar terkait TPS3R dan swakelola pengelolaan sampah terbatas karena pandemi covid yang sedang terjadi pada saat itu.

## 5. Responsivitas (Responsiveness)

Responsivitas dalam kebijakan publik merujuk pada kemampuan suatu kebijakan untuk merespons perubahan atau kebutuhan masyarakat dengan cepat dan efektif. Hal ini berarti bahwa suatu kebijakan harus dapat beradaptasi dengan perubahan dalam lingkungan sosial,

ekonomi, politik, dan teknologi, serta mampu memberikan solusi untuk masalah yang dihadapi oleh masyarakat. kebijakan swakelola pengelolaan sampah masih belum dikatakan responsive baik dari segi mengatasi permasalahan yang timbul selama pelaksanaan kebijakan ataupun dari segi pelaksanaan kebijakannya. Kebijakan ini mengatur tentang upaya peningkatan kualitas dan kuantitas pengelolaan sampah, sehingga mampu memberikan manfaat yang optimal bagi lingkungan dan masyarakat tetapi masih mengalami beberapa kendala seperti kurangnya sikap responsive dari masyarakat yang diakibatkan dari kurangnya sosialisasi DLHK Kota Denpasar karena terkendala pandemic covid-19 pada saat itu yang membatasi interaksi antara DLHK Kota Denpasar dengan masyarakat.

6. Ketepatan (Appropriateness)

Ketepatan dalam kebijakan publik mengacu pada seberapa efektif dan efisien sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Secara lebih spesifik, ketepatan mencakup dua aspek penting: pertama, kebijakan harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan secara efektif, yaitu mencapai hasil yang diharapkan dengan cara yang optimal; kedua, kebijakan harus dilaksanakan dengan cara yang efisien, yaitu menggunakan sumber daya yang tersedia dengan cara yang paling optimal. pelaksanaan swakelola pengelolaan sampah di kota Denpasar belum berjalan dengan optimal dikarenakan masih terdapat kendala yang perlu diatasi, seperti kurangnya kesadaran masyarakat akan kondisi lingkungan, peran dari DLHK Kota Denpasar dalam melaksanakan sosialisasi yang menjadi sangat terbatas dikarenakan pandemic covid-19, kurangnya SDM yang mampu menangani permasalahan dalam pengelolaan sampah dan limbah b3 dan kurangnya efektivitas dan efisiensi dalam menggunakan sumber daya yang ada.

### **3.2. Faktor Penghambat Berjalannya Kebijakan Swakelola Pengelolaan Sampah Di Kota Denpasar Provinsi Bali**

Dalam pelaksanaan suatu program tentunya ada suatu hambatan yang dihadapi. Penulis memperhatikan bahwa kebijakan swakelola pengelolaan sampah di Kota Denpasar memiliki hambatan- hambatan. Hambatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan benar masih kurang. Banyak masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan, tidak memilah sampah organik dan non-organik, dan tidak memanfaatkan sampah sebagai sumber energi atau bahan daur ulang. Dari pihak Dinas Lingkungan Hidup telah melaksanakan sosialisasi terkait swakelola pengelolaan sampah tersebut yang dimana Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar telah mengeluarkan surat perintah tugas untuk melaksanakan sosialisasi tersebut namun sosialisasi yang dilakukan belum secara rutin dilaksanakan. Berikut contoh surat perintah tugas yang dikeluarkan untuk melaksanakan sosialisasi tentang pengelolaan sampah.

2. Keterbatasan Infrastruktur

Infrastruktur yang kurang memadai seperti sarana dan prasarana pengangkutan, fasilitas tempat pembuangan akhir, dan teknologi pengelolaan sampah yang canggih dan modern menjadi penghambat dalam pelaksanaan kebijakan swakelola pengelolaan sampah di Kota



Denpasar. Pelaksanaan swakelola sampah di Kota Denpasar masih terkendala oleh kurangnya infrastruktur yang memadai, seperti fasilitas pembuangan sampah serta teknologi pengolahan sampah yang modern. Hal ini tentunya dapat menghambat jalannya program swakelola sampah di Kota Denpasar.

### 3. Kurangnya Keterlibatan Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan swakelola pengelolaan sampah sangat penting. Namun, jika masyarakat kurang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan ini, maka kebijakan ini tidak akan berjalan dengan optimal dan pada Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 2019 Bab III Pasal 6 telah dijelaskan bahwa masyarakat merupakan pelaksana dari kebijakan swakelola pengelolaan sampah ini. Masih ada masyarakat yang kurang terlibat dalam program swakelola sampah di Kota Denpasar. Oleh karena itu, diperlukan upaya dan solusi yang tepat untuk mengatasi hambatan tersebut agar kebijakan swakelola pengelolaan sampah di Kota Denpasar dapat berjalan dengan optimal dan efektif. Upaya yang dapat dilakukan antara lain adalah peningkatan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi, pengembangan infrastruktur dan teknologi yang canggih dan modern, peningkatan anggaran untuk pengelolaan sampah, penyusunan kebijakan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan swakelola pengelolaan sampah.

### **3.3. Upaya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Dalam Mengatasi Faktor Penghambat Berjalannya Kebijakan Swakelola Pengelolaan Sampah Di Kota Denpasar Provinsi Bali**

Dalam mengatasi suatu hambatan, tentunya terdapat upaya-upaya dalam rangka mengatasi hambatan tersebut. Dalam program swakelola sampah di Kota Denpasar memang terdapat hambatan dalam pelaksanaannya. Adapun Surat Perintah Tugas yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar sebagai bentuk upaya untuk menangani faktor penghambat dari kebijakan swakelola tersebut. Meningkatkan pembinaan petani mengenai pemasaran

#### 1. Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi

Upaya Dinas Lingkungan Hidup dan Kesehatan Kota Denpasar untuk mengatasi faktor penghambat kebijakan swakelola pengelolaan sampah adalah melalui peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Dalam hal ini, dinas lingkungan hidup dan kesehatan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti komunitas lingkungan, kelompok tani, serta LSM lingkungan. Sosialisasi dilakukan dengan berbagai cara, seperti membuat poster, spanduk, brosur, serta mengadakan kegiatan sosialisasi seperti seminar dan diskusi bersama masyarakat. Pada sosialisasi tersebut, dinas lingkungan hidup dan kesehatan menyampaikan informasi mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan benar serta menjelaskan cara-cara pengelolaan sampah yang baik dan benar. Selain itu, edukasi juga dilakukan dengan cara memberikan pelatihan kepada masyarakat mengenai pengelolaan sampah. Pelatihan dilakukan dengan metode praktik, sehingga masyarakat dapat langsung mempraktekkan cara-cara pengelolaan sampah yang baik dan benar. Namun, upaya yang telah dilaksanakan terhambat karena adanya faktor pandemic covid-19 pada saat itu yang mengakibatkan kurangnya pelaksanaan sosialisasi yang optimal.

#### 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana



Upaya kedua yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kesehatan Kota Denpasar adalah peningkatan sarana dan prasarana. Dalam hal ini, dinas lingkungan hidup dan kesehatan bekerja sama dengan pemerintah setempat untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung kebijakan swakelola pengelolaan sampah. Sarana dan prasarana yang ditingkatkan meliputi pembangunan tempat pembuangan sampah yang representatif, pemberian fasilitas pengolahan sampah seperti mesin pencacah dan mesin pengolah sampah organik, serta peningkatan sistem pengangkutan sampah yang lebih efektif dan efisien.

### **3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar salah satunya adalah dengan meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Usaha tersebut dibantu dengan melaksanakan Kerjasama dengan beberapa pihak terkait seperti LSM lingkungan dan Komunitas Lingkungan sehingga dapat terlaksana edukasi dan sosialisasi yang efektif dan efisien. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup meningkatkan sarana dan prasarana seperti pembangunan tempat pembuangan sampah yang representatif, pemberian mesin pengolah sampah dan peningkatan sistem pengangkutan sampah yang lebih efektif dan efisien.

## **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan diatas, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai hasil penelitian, antara lain :

1. Evaluasi Kebijakan Swakelola Pengelolaan Sampah belum berjalan dengan optimal karena masih banyak kendala dan hambatan yang ada dalam pelaksanaan swakelola pengelolaan sampah di Kota Denpasar yang dianalisis menggunakan teori Evaluasi menurut William N. Dunn (2003) dengan indikator Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Kemerataan, Responsivitas, Ketepatan. Hal ini ditandai dengan peningkatan timbulan sampah tiap tahunnya meskipun telah melakukan beberapa upaya dalam swakelola pengelolaan sampah. Selain itu, kurangnya ada interaksi secara berkala atau rutin antara dinas dengan masyarakat juga menjadi faktor yang mengakibatkan kurangnya responsivitas dari masyarakat terhadap kebijakan. Terakhir, dari aspek ketepatan atau appropriateness, Dinas Lingkungan Hidup dan Kesehatan Kota Denpasar telah tepat dalam penerapan kebijakan swakelola sampah karena upaya-upaya yang dilaksanakan telah sesuai dengan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai. Meskipun upaya yang dilaksanakan masih mengalami kendala dan hambatan, belum efektif, kurang efisien dan kurang responsif dan belum memenuhi aspek kecukupan tetapi yang dilaksanakan masih tepat sasaran dan sesuai dengan target yang ingin dicapai.
2. Faktor Penghambat pelaksanaan swakelola pengelolaan sampah, meliputi kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan infrastruktur, dan kurangnya keterlibatan masyarakat.
3. Upaya Dinas Lingkungan Hdup dan Kebersihan dalam mengatasi faktor penghambat berjalannya Kebijakan Swakelola Pengelolaan Sampah Di Kota Denpasar, yaitu meningkatkan sosialisasi dan edukasi serta peningkatan sarana dan prasarana.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Berdasarkan aspek efektivitas, untuk meningkatkan pemahaman tentang swakelola pengelolaan sampah pada pegawai DLHK Kota Denpasar sehingga dalam mengatasi permasalahan atau hambatan yang mungkin terjadi pada swakelola pengelolaan sampah. Dari segi efisiensi, hendaknya meningkatkan kemampuan SDM dalam menggunakan atau memanfaatkan sumber daya yang ada dan perlunya peningkatan kesadaran masyarakat akan swakelola pengelolaan sampah. Aspek kecukupan atau adequacy, hendaknya lebih memanfaatkan sumber daya yang telah ada dan tidak bergantung terhadap aset yang belum dimiliki DLHK Kota

Denpasar. Dalam aspek perataan atau equity, hendaknya meningkatkan kesadaran masyarakat dengan memberikan edukasi yang dilakukan secara insentif untuk mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat terkait pengelolaan sampah dan meningkatkan ketersediaan tempat pembuangan sampah dengan memprioritaskan daerah yang belum dibantu sebelumnya. Dari aspek Responsivitas atau responsiveness, hendaknya dinas meningkatkan frekuensi sosialisasi yang dilakukan oleh dinas kepada masyarakat guna untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait swakelola pengelolaan sampah. Dari aspek ketepatan atau appropriateness, peneliti memberikan saran agar dinas melibatkan semua pihak yang terkait dalam pelaksana swakelola pengelolaan sampah. Pada proses pengambilan keputusan, perlu melibatkan stakeholder yang memiliki pengetahuan dan kepentingan yang beragam. Selain itu, agar hendaknya mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi yang dapat memantau jalannya kebijakan swakelola pengelolaan sampah tersebut. Selain itu, Hendaknya DLHK Kota Denpasar lebih meningkatkan frekuensi dalam pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan dan survey yang dilaksanakan secara rutin agar masyarakat paham tentang pentingnya swakelola pengelolaan sampah. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar dapat lebih meningkatkan efisiensi dalam penggunaan infrastruktur yang ada dengan melakukan perawatan dan pemeliharaan yang secara rutin. Hendaknya DLHK Kota Denpasar lebih meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah dan memotivasi masyarakat agar terlibat lebih aktif dalam pengelolaan sampah. Kemudian dinas dapat melakukan edukasi kepada masyarakat dan mengajak masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.

## **V. UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar beserta jajarannya karena telah membantu peneliti dalam proses penelitian ini.

## **VI. DAFTAR PUSTAKA**

Ali, Zainuddin, 2011, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.

Alex S., 2012, Sukses Mengolah Sampah Organik Menjadi Pupuk Organik, Pustaka Baru Press, Yogyakarta.

Arikunto, S., & Safruddin, C. (2010). Evaluasi Program Pendidikan. Bumi Aksar.

Budiarsa Suyasa, Wayan dan Made Sudiana Mahendra, 2016, Evaluasi dan Perencanaan Pengelolaan Sampah Perkotaan, Udayana University Press.

Dunn, William N. 1994. Public Personnel Management and public policy. New York: Addison Wesley Longman.

Dunn, William N. (2003). William-N.-Dunn-Pengantar-Analisis-Kebijakan-Publik-Gadjah-Mada-University-Press-2003\_compressed-1.pdf (p. 710).

Gedeona, Hendrikus Tri Wibawanto. 2010. Pendekatan Kualitatif dan Kontribusinya dalam Penelitian Administrasi Publik. Jurnal Ilmu Administrasi, Volume VII No. 3, Hal. 183-192.

Hartono, R. (2008). Penanganan dan Pengolahan Sampah. In Penebar Swadaya Grup. [https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=OfOWCgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=masalah+h+sampah+di+dunia&ots=0pK5--0a-9&sig=Nk0IDyLIWxSIIzmk48a3TswIxxw&redir\\_esc=y#v=onepage&q=masalah+sampah+di+dunia&f=false%0Ahttps://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=OfOW](https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=OfOWCgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=masalah+h+sampah+di+dunia&ots=0pK5--0a-9&sig=Nk0IDyLIWxSIIzmk48a3TswIxxw&redir_esc=y#v=onepage&q=masalah+sampah+di+dunia&f=false%0Ahttps://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=OfOW)



- Indrawan, R, Yaniawati, R. . (2017). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran untuk Manajemen Pembangunan, dan Pendidikan. PT. Refika Aditama.
- Iswanto. (2005). Sistem pengelolaan sampah produktif berbasis masyarakat ala Sukunan. Yogyakarta: Departemen Kesehatan RI.
- Jones, Charles O. 1984. Pengantar Kebijakan Publik (terjemahan). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kusnardi dan Bintan R. Saragih, 2000, Ilmu Negara, Gaya Media Pratama, Jakarta.
- Kountur, Ronny, 2007, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis, Buana Printing, Jakarta.
- Milles, Mathew B & A. Michael Huberman. 1992. Qualitative Data Analysis. Sage Publications Inc.
- Moleong, L. J. (2013). Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya.
- Neuman, L. W. (2006). Social Research Methods. Pearson.
- Nugroho, R. (2017). Public Policy (Edisi 6). PT Elex Media Komputindo.
- Nurdin dan Hartati. (2019). Metodologi Penelitian Sosial. Media Sahabat Cendikia.
- Sejati, K. (2009). Kuncoro Sejati - Pengolahan Sampah Terpadu -Penerbit Kanisius (2009).pdf (p. 12).
- Soekanto, Soerjono, 2016, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Simangunsong, F. (2016). Metodologi Penelitian Pemerintahan TeoritikLegalistik-Empirik-Inovatif. CV Alfabeta.
- Sudijono, A. (2009). Pengantar Evaluasi Pendidikan. Rajawali P.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Bali, L. B.-C. U. (2003). Sistem Pengelolaan Sampah Berbasis pada Masyarakat. USAID, Jakarta., 27-48.
- Dhiani, H. P., Arsid, H., Awaludin, T., Fiyah, M. ', & Wardani, S. (2021). Manajemen Sistem Pengelolaan Sampah Yang Mampu Memanfaatkan Potensi Sampah Secara Optimal. Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(3), 1-7.
- Fadlilah, U., & Setiani, V. (2021). Analisis Pemahaman Tentang Pengelolaan Sampah Komunitas Bank Sampah Induk Surabaya (Bsis) Melalui Transfer Knowledge. JST (Jurnal Sains Terapan), 7(1). <https://doi.org/10.32487/jst.v7i1.1131>
- Hakim, M. Z. (2019). Pengelolaan dan Pengendalian Sampah Plastik Berwawasan Lingkungan. Amanna Gappa, 27(2).
- Harjanti, I. M., & Anggraini, P. (2020). Pengelolaan Sampah Di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatibarang, Kota Semarang. Jurnal Planologi, 17(2), 185. <https://doi.org/10.30659/jpsa.v17i2.9943>

I Made Dicky Taruna Wijaya\*, Ida Ayu Putu Widiati, dan I. W. A. (2022). Efektivitas Pelaksanaan Program Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber. 4(2), 146–150.

Ismi, N., Jinca, M. Y., & Sutopo, Y. K. D. (2021). Implementasi Konsep Pengelolaan Sampah Ramah Lingkungan (Green Waste) di Kampus Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Kabupaten. *Jurnal Wilayah & Kota Maritim*, 9(2). <https://doi.org/10.20956/jwkm.v9i2.1191>

Juniartini, N. L. P. (2020). Pengelolaan Sampah Dari Lingkup Terkecil dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai Bentuk Tindakan Peduli Lingkungan. *Jurnal Bali Membangun Bali*, 1(1), 27–40. <https://doi.org/10.51172/jbmb.v1i1.106>

Kosanke, R. M., & Menhan. (2019). Bahan Pembelajaran Pengadaan Barang Dan Jasa Dengan Swakelola. <https://www.kemhan.go.id/badiklat/2017/12/14/hanjar-bahasa-rusia-bagi-athan.html>

Kusminah, I. L. (2018). Penyuluhan 4R (Reduce, Reuse, Recycle, Replace) dan Kegiatan Bank Sampah Sebagai Langkah Menciptakan Lingkungan yang Bersih dan Ekonomis di Desa Mojowuku Kab. Gresik. *JPM17: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(01), 22–28. <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/jpm17/article/view/1165>

Kusnayadi, H., Nurwahidah, S., Mastar, S., & Wijayanti, N. (2021). Pelatihan Pengelolaan Sampah Organik di Desa Jurumapin Berbasis Kompos Limbah Rumah Tangga. *Jurnal Ilmiah Pangabdhi*, 7(1), 15–18. <https://doi.org/10.21107/pangabdhi.v7i1.9144>

Matondang, A. (2019). Dampak Modernisasi Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat Asnawati. *Wahana Inovasi : Jurnal Pengabdian Dan Penelitian Masyarakat Uisu*, 45(45).

Muhammad Rapii, Muhammad Zainul Majdi, Rohaeniah Zain, dan Q. A. (2021). Pengelolaan Sampah Secara Terpadu Berbasis Lingkungan Masyarakat Di Desa Rumbuk. *Jurnal Ilmiah Pengembangan Dan Penerapan IPTEKS*, 19.

Saepulloh, A., & Rusdiana, A. (2021). Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar: Dasar-dasar Pengetahuan Sosial dan Konsep-konsep Budaya. 149–149.

Sahil, J., Muhdar, M., Rohman, nF., & Syamsuri, I. (2016). Waste management at Dufa Dufa subdistrict, City of Ternatee (in Bahasa Indonesia). *BIOeduKASI*, 4(2), 478–487.

Sudarsana, I. W. (2017, August 4). Denpasar Raih Adipura Empat Kali Berturut-turut. <https://Balitribune.Co.Id/Content/Denpasar-Raih-Adipura-Empat-Kali-Berturut-Turut>.

Sulasminingsih, S., Noegrahini L, N. L., & Marlina, M. (2020). Pengelolaan Sampah Mandiri Berbasis Masyarakat Di Kelurahan Rangkapan Jaya Baru Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok Sebagai Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*, 3(1), 148–154. <https://doi.org/10.24912/jbmi.v3i1.8044>

Susila, J. (2019). Industrialisasi Dan Pembangunan Berkesinambungan. *Jurnal Jurisprudence*, 8(2). <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v8i2.6380>

Taufiq, A., & Maulana, F. M. (2015). Sosialisasi Sampah Organik dan Non Organik serta Pelatihan Kreasi Sampah. *Jurnal Inovasi Dan Kewirausahaan*, 4(1), 14–15. <https://journal.uii.ac.id/ajie/article/view/7898>



Yoselin Herdion Wong, M. (2019). Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Air Di Kota Balikpapan. *Society*, 2(1), 1–19. [http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84865607390&partnerID=tZOtx3y1%0Ahttp://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=2LIMMD9FVXkC&oi=fnd&pg=PR5&dq=Principles+of+Digital+Image+Processing+fundamental+techniques&ots=HjrHeuS\\_](http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84865607390&partnerID=tZOtx3y1%0Ahttp://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=2LIMMD9FVXkC&oi=fnd&pg=PR5&dq=Principles+of+Digital+Image+Processing+fundamental+techniques&ots=HjrHeuS_)

Solikhatun, I. (2016). Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) (Studi Pada Smk Negeri 1 Yogyakarta) (Analysis of School Operational Assistance (Bos) Funds Management). *Jurnal Kajian Pendidikan Akuntansi Indonesia*, 5(5), 1–13.

